

# COMMUNICATIONS

## Diskursus Pemberitaan Media Online mengenai Penerimaan Izin Usaha Pertambangan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

<sup>1\*</sup>Said Romadlan, <sup>2</sup>Mukhlis Muhammad Maududi, <sup>3</sup>Dini Wahdiyati, <sup>4</sup>Gilang Kumari Putra

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jalan Limau II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12130, Indonesia.

[\\*saidromadlan@uhamka.ac.id](mailto:saidromadlan@uhamka.ac.id), [maoedoedi@uhamka.ac.id](mailto:maoedoedi@uhamka.ac.id), [diniwahdiyati@uhamka.ac.id](mailto:diniwahdiyati@uhamka.ac.id), [gilang.kumari@uhamka.ac.id](mailto:gilang.kumari@uhamka.ac.id)

### ARTICLE INFO

Received on February 17, 2025

Received in revised from July 27, 2025

Accepted July 30, 2025

Published on July 31, 2025

**Keywords:** (3-5 words)

Discourse

Online Media

Mining Business License

Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama

### ABSTRACT

*As an Islamic community organization, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) have received an offer for a mining business license from the Government. This acceptance raises pros and cons from various circles. The controversy over the receipt of mining business licenses by Muhammadiyah and NU then became a discourse in the online media, where there was a discourse of pros and cons over the receipt of the mining permit. This study aims to show the discourse of online media news regarding the receipt of mining business licenses by Muhammadiyah and NU. For this reason, the method used is the discourse analysis of the Halliday-Hasan model which focuses its analysis on three elements, namely (1) tenor of discourse, (2) field of discourse, and (3) mode of discourse. The results of the study show that there are two areas of discourse that appear in the online media, namely approving (pro) and rejecting (con) the receipt of mining business licenses by Muhammadiyah and NU. For the tenor of discourse in the field of discourse who agree are dominated by sources from Muhammadiyah leaders, NU leaders, and members of the House of Representatives. Meanwhile, the tenor of the discourse who*

**How to cite this article:** Romadlan, S., Maududi, M.M., Wahdiyati, D., Putra, G.K. (2025). Diskursus Pemberitaan Media Online mengenai Penerimaan Izin Usaha Pertambangan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Communications* 7(2), 171-193.



*refused came from Muhammadiyah internal circles, non-governmental organization activists, academics/experts, and members of the House of Representatives. The mode of discourse used by online media are descriptive, argumentative, and persuasive writing styles. The results of this study strengthen the influence of media routines on the practice of media discourse.*

*penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bidang diskursus yang muncul di media online yaitu menyetujui (pro) dan menolak (kontra) penerimaan izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU. Untuk pelibat wacana pada bidang wacana yang menyetujui didominasi oleh sumber dari kalangan pimpinan Muhammadiyah, NU, dan anggota DPR. Sedangkan pelibat wacana yang menolak berasal dari kalangan internal Muhammadiyah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, akademisi/pakar, dan anggota DPR. Adapun sarana wacana yang digunakan oleh media-media online adalah gaya penulisan deskriptif, argumentatif dan persuasif. Hasil penelitian ini memperkuat pengaruh rutinitas media pada praktik diskursus media.*

## **ABSTRAK**

*Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah menerima tawaran izin usaha pertambangan dari Pemerintah. Penerimaan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk kalangan internal kedua organisasi Islam tersebut. Kontroversi penerimaan izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU kemudian menjadi diskursus di media-media online, di mana muncul diskursus pro dan kontra atas penerimaan izin pertambangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan diskursus pemberitaan media online mengenai penerimaan izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU. Untuk itu, metode yang digunakan adalah analisis wacana model Halliday-Hasan yang memfokuskan analisisnya pada tiga elemen yaitu (1) pelibat wacana (tenor of discourse), (2) bidang wacana (field of discourse), dan (3) sarana wacana (mode of discourse). Hasil*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024, Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan. Maka mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut, Ormas-Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis, PGI, dan Ormas-ormas keagamaan lainnya berhak mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Dalam perkembangannya, PP No. 25 tahun 2024 ini banyak mendapat kritik terutama dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), yang memandang kebijakan ini hanya bertujuan menjinakkan Ormas-ormas keagamaan. Selain itu, peraturan

pemerintah ini dianggap melanggar UU Minerba, memicu konflik horizontal, dan akan menguntungkan Perusahaan semata (BBC News Indonesia, 1 Juni 2024).

Sebagai Ormas keagamaan Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan NU memutuskan menerima IUPK yang ditawarkan oleh Pemerintah tersebut. NU bahkan menjadi Ormas keagamaan yang paling pertama menyatakan menerima IUPK ini, karena menurut Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH. Yahya Staquf, NU memang membutuhkan biaya untuk pengembangan program-program organisasi. Sedangkan Muhammadiyah juga akhirnya menerima IUPK yang diputuskan melalui hasil konsolidasi nasional setelah sekian waktu gamang, dengan pertimbangan untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang pro-kesejahteraan dan pro-lingkungan.

Penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU memantik reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk kalangan internal kedua Ormas Islam moderat tersebut. Kalangan yang pro dengan penerimaan IUPK didominasi kalangan pimpinan dan pengurus kedua Ormas tersebut. Mereka menekankan bahwa penerimaan IUPK ini untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Sedangkan pihak-pihak yang kontra dan menolak penerimaan IUPK lebih banyak dari kalangan aktivis dan arus bawah internal kedua Ormas keagamaan tersebut. Penerimaan NU atas IUPK dipandang sebagai sikap yang tidak konsisten oleh kalangan warga NU (*Nahdliyin*), karena dulu NU mengharamkan pertambangan karena dampaknya yang merusak lingkungan, tapi sekarang menghalalkan dengan menerima IUPK yang ditawarkan pemerintah (BBC News Indonesia, 10 Juni 2024). Di kalangan Muhammadiyah, penerimaan IUPK ini disambut dengan demonstrasi penolakan oleh Aliansi Muda Peduli Muhammadiyah atas Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (detik.com, 27 Juli 2024).

Di sisi lain, penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU juga menjadi diskursus di berbagai media online yang ditampilkan dalam pemberitaan-pemberitaannya. Berdasarkan pengamatan awal, media-media online menunjukkan dua bidang diskursus yang berbeda yaitu diskursus yang mendukung dan dikursus yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU ini. Diskursus media-media online yang menolak misalnya dapat dilihat pada berita-berita dengan judul berikut, "*Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan*" (Kompas.com, 06/06/2024), "*Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang*" (tempo.co, 10/06/2024), dan "*Aisyiyah Tolak Izin Tambang: Tanpa Menambang, Muhammadiyah Mampu*" (detik.com, 26/07/2024).

Sedangkan diskursus media-media online yang mendukung penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU dapat diamati pada berita-berita, "*PBNU: Tambang dari Pemerintah Halal, Tak Haram Sama Sekali*" (Kompas.com, 10/07/2024), "*Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan*" (tempo.co, 25/07 2024), dan "*PP Muhammadiyah Resmi Umumkan Siap Kelola Tambang*" (detik.com, 28/07/2024).

Perbedaan-perbedaan diskursus media online mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bila diskursus atau penggunaan bahasa dipandang sebagai sebuah pola-pola isi pemberitaan media online, maka terdapat faktor-faktor yang menentukan diskursus sebagai pola-pola isi pemberitaan. Menurut Shoemaker dan Reese, faktor-faktor yang dapat memengaruhi pola-pola isi pemberitaan media adalah (a) individu pekerja media, (b) praktik/rutinitas media, (c) organisasi media, (d) ekstramedia, dan (e) ideologi media (Shoemaker & Reese, 1996). Dalam kajian-kajian mengenai faktor yang memengaruhi diskursus media lebih dikaitkan dengan faktor relasi kekuasaan antara media dengan kekuatan dominan seperti negara dan kekuatan lainnya. Seperti kajian mengenai diskursus LGBT di media daring yang cenderung dipenuhi ujaran kebencian dan memosisikan kelompok LGBT sebagai obyek yang didukung oleh Negara (Listiorini et al., 2019).

Dalam diskursus media mengenai komunisme juga menunjukkan faktor ideologi antikomunisme yang menentukan pemberitaan media (Kudri & Ciptadi, 2023). Faktor lainnya yang memengaruhi diskursus media adalah identitas media dalam pemberitaan media online mengenai makna jihad (Romadlan et al., 2021). Kajian-kajian lain mengenai faktor-faktor yang menentukan diskursus di antaranya adalah diskursus mengenai toleransi terhadap non-muslim di kalangan Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh ideologi Islam Berkemajuan (Romadlan, 2019), dan diskursus mengenai negara Pancasila di kalangan Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh ideologi Islam Moderat (Romadlan, 2020).

Diskursus mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU ini menjadi polemik dan menimbulkan kontroversi karena posisi Muhammadiyah dan NU sendiri yang selama ini dikenal sebagai organisasi Islam moderat yang bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan, pesantren, dan program-program pemberdayaan sosial lainnya melalui amal usaha yang mereka miliki (Barton, 2014). Kedua organisasi Islam ini juga dikenal sebagai kekuatan Islam sipil yang memiliki perhatian kuat pada pengembangan demokrasi di Indonesia (Hefner, 2001;

Sutley & Hefner, 2001; van Bruinessen, 2003). Sedangkan pada bidang pengelolaan pertambangan, Muhammadiyah dan NU dianggap tidak memiliki pengalaman dan kapasitas untuk mengelola pertambangan sehingga dikuatirkan justru akan menjadi pemicu munculnya konflik kepentingan di tubuh kedua organisasi Islam tersebut.

Di samping itu, selama ini Muhammadiyah dan NU dikenal sebagai organisasi Islam yang memiliki perhatian sungguh-sungguh mengenai pelestarian lingkungan, dan menolak segala bentuk tindakan pengrusakan lingkungan, termasuk melalui pertambangan. Melalui doktrin Islam Berkemajuan, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan bahwa Islam Berkemajuan adalah “Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketidakadilan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan” (Nashir, 2010, 2014). Adapun NU dengan doktrin Islam Nusantara menegaskan sebagaimana hasil Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang, bahwa eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram. Termasuk pemberian izin eksploitasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi maka hukumnya haram jika disengaja (Rumadi et al., 2016).

Maka dari itu, penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU dipandang banyak kalangan sebagai pengingkaran atas perjuangan kedua Ormas Islam berpengaruh di Indonesia ini untuk menjaga kelestarian alam dari segala bentuk eksploitasi. Pada titik inilah keputusan penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU tersebut banyak disayangkan oleh kalangan aktivis LSM, akademisi, dan masyarakat, karena dianggap tidak sesuai dengan garis perjuangan atau khittah Muhammadiyah dan NU. Bahkan keputusan penerimaan IUPK ini juga ditentang dan dikritik oleh kalangan internal kedua organisasi Islam itu sendiri, karena adanya kekuatiran akan merugikan dan memicu konflik internal organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana diskursus pemberitaan media-media online mengenai penerimaan izin usaha pertambangan khusus oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengungkapkan diskursus pemberitaan media-media online mengenai penerimaan izin usaha pertambangan khusus oleh Muhammadiyah dan NU. Penelitian ini memiliki urgensi mengenai peran media massa, khususnya media-media online dalam memberikan pandangan-

pandangan kepada pemerintah dan Ormas melalui diskursus yang dimunculkan tentang izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah dan NU.

Untuk mengkaji permasalahan penelitian di atas, studi ini menggunakan konsep diskursus sebagai kerangka kerja konseptualnya. Istilah diskursus (*discourse*) digagas oleh Michel Foucault untuk menggambarkan penggunaan bahasa dengan cara-cara tertentu, terutama untuk mengonstruksi, membentuk, dan menghasilkan pengetahuan (Lubis, 2014). Diskursus juga dapat dipahami sebagai tindakan sosial dan interaksi orang-orang pada situasi sosial tertentu (Fairclough, 1995). Diskursus meliputi penciptaan makna dalam proses sosial, di mana bahasa digunakan pada bidang atau praktik sosial tertentu, dengan cara mengonstruksi aspek-aspek dunia yang dikaitkan dengan perspektif tertentu (Fairclough, 2013).

Dalam konteks komunikasi, diskursus merupakan relasi antara orang-orang yang berbicara, menulis, dan cara-cara berkomunikasi seseorang dengan orang lainnya, termasuk menggambarkan peristiwa-peristiwa komunikatif yang menggunakan media massa seperti pemberitaan, dan penulisan artikel (Fairclough, 2010). Diskursus dapat juga dikaitkan dengan realitas sosial, di mana realitas sosial yang ada merupakan hasil produksi dan konstruksi melalui diskursus yang menghasilkan makna tertentu (Bryman, 2012). Selain itu, diskursus dapat juga diposisikan sebagai teks yang dibakukan melalui tulisan, yaitu bahasa sebagai suatu peristiwa (*event*) yang membicarakan sesuatu. Maka, diskursus di sini selalu berhubungan dengan penggunaan bahasa, atau dengan kata yang lain diskursus merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Dengan demikian diskursus adalah sebuah peristiwa yang merujuk pada dunia yang digambarkan, diungkapkan, dan diinterpretasikan (Ricoeur, 2006; Ricoeur & Thompson, 2016).

Fokus penelitian ini adalah diskursus media-media online mengenai penerimaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Ormas Muhammadiyah dan NU. Berkaitan dengan IUPK oleh Ormas terdapat kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini tapi dengan menggunakan sudut analisis yang berbeda seperti kajian mengenai dampak pemberian izin usaha pertambangan pada aspek sosial-ekonomi warga NU (Sholahudin & Maksum, 2024). Studi lainnya mengenai regulasi PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan di Indonesia yang dianggap tidak tepat (Prastika et al., 2024), dan dari sudut pandang kesejahteraan bahwa penerapan PP Nomor 25 Tahun 2024 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski juga menimbulkan sejumlah kekuatiran akan dampaknya (Apriyanto & Maruf, 2024).

Studi-studi lainnya mengenai pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas keagamaan untuk pembangunan nasional yang hanya sebagai selubung ideologis semata karena di dalamnya terdapat berbagai kontradiksi (Fariduddin & Kusuma, 2024). Dilihat dari sisi navigasi aktivitas digital, masyarakat Indonesia secara umum menentang keterlibatan Muhammadiyah dan NU mengelola usaha pertambangan dan dapat memperburuk citra publik kedua Ormas tersebut (Rohma, 2024). Bahkan pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) (Putera, 2024). Termasuk dari aspek kelayakan dan kemampuan Ormas keagamaan yang dianggap tidak mampu mengenai pertambangan karena bukan kapasitasnya (Astinda et al., 2024).

Sedangkan studi-studi terdahulu mengenai diskursus media online sudah banyak dilakukan dengan mengambil berbagai isu yang ditampilkan, di antaranya diskursus mengenai representasi gender di buku-buku teks untuk kepentingan ideologi kapitalisme (Amerian & Esmaili, 2014). Selain itu terdapat juga diskursus mengenai Islam Nusantara di media online di mana Islam Nusantara dipandang sebagai salah satu solusi atas berbagai persoalan bangsa (Wafi et al., 2022). Diskursus lainnya adalah mengenai deradikalisasi melalui media online sebagai upaya menyegah radikalisme berkembang di Indonesia (Romadlan, 2022), dan diskursus mengenai pemilihan presiden di media sosial (Azmah et al., 2023).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi-studi sebelumnya, yaitu meskipun sama-sama mengkaji mengenai izin usaha pertambangan untuk Ormas keagamaan tapi penelitian ini fokus pada bagaimana media-media online mewacanakan isu IUPK ini. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji masalah izin usaha pertambangan ini dari berbagai sudut pandang lainnya, seperti hukum, ekonomi, dan politik. Sedangkan berkaitan dengan diskursus memang sudah banyak yang menggunakan istilah ini tapi dalam konteks yang berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada diskursus media-media online mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Kajian-kajian sebelumnya menggunakan diskursus untuk konteks representasi gender, politik, keislaman, dan lain sebagainya.

Perbedaan tersebut sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu permasalahan penelitian mengenai IUPK untuk Ormas Keagamaan yang dikaji dari perspektif komunikasi (media online). Selain itu, kebaruannya juga terlihat dari metode penelitian yang berbeda dari studi-studi sebelumnya, yaitu memakai analisis wacana model Hasan-Halliday yang memfokuskan analisisnya pada pelibat wacana, bidang wacana, dan sarana wacana.

## METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang lebih menekankan kedalaman kajian, dan temuan penelitian merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan subyek penelitian. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana model Halliday dan Hasan yang menfokuskan analisisnya pada tiga elemen wacana, yaitu: pelibat wacana (*tenor of discourse*), bidang wacana (*field of discourse*), dan sarana wacana (*mode of dicscourse*). Pelibat wacana berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam diskursus dan posisinya sebagai apa. Bidang wacana mengacu pada tindakan sosial yang sedang terjadi atau diskursus yang sedang dibahas. Sarana wacana mengacu pada pilihan bahasa yang digunakan, termasuk penggunaan gaya bahasa tertentu (Halliday & Hasan, 1992). Analisis wacana ini relevan dengan fokus penelitian ini yakni mengenai diskursus yang juga menekankan penggunaan bahasa sebagai alat untuk menciptakan makna dan mengonstruksi realitas sosial tertentu.

Media online yang dianalisis meliputi Detik.com, Kompas.com. dan Tempo.co dengan alasan karena media-media online tersebut dinilai tajam dan kritis oleh pembaca (Kompas.com, 14/09/2023), dan sering diakses masyarakat (detik.com, 18/07/2023). Selain itu, ketiga media online ini dipandang sebagai pioner media-media berbasis internet di Indonesia. Detik.com adalah salah satu pelopor media online di Indonesia yang berdiri pada 9 Juli 1998 dengan nama yang diambil dari Tabloid DeTik. Pada 3 Agustus 2011 Detik.com diakusisi oleh CT Corp di bawah naungan Trans Corp. Sedangkan Kompas.com awalnya adalah versi *online* dari Surat Kabar Kompas dengan nama Kompas Online pada 14 September 1995. Adapun Tempo.co adalah media online yang didirikan PT Tempo Inti Media pada tahun 1996 dengan nama awal tempointeraktif yang menjadi pionir media berita berbasis internet di Indonesia.

Unit analisis penelitian ini adalah berita-berita tentang penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU pada media online Detik.com, Kompas.com. dan Tempo.co selama bulan Juni-Juli 2024. Sedangkan unit pengamatannya meliputi judul, isi berita, narasumber, dan foto.

Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kajian Pustaka (*literature review*). Dokumentasi merupakan data-data dalam bentuk seperti dokumen pribadi, data-data administrasi, dokumen berkala, dan berita-berita media massa (Eriyanto, 2019). Bentuk dokumentasi pada penelitian ini adalah berita-berita media online tentang penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Sedangkan studi pustaka dipakai untuk memperoleh data yang berkaitan konteks penelitian (Berger, 2011). Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan faktor yang memengaruhi diskursus mengenai penerimaan IUPK oleh

Muhammadiyah dan NU.

Analisis data menggunakan analisis teks dan analisis konteks. Analisis teks menggunakan analisis wacana model Halliday-Hasan yang meliputi tiga elemen, yaitu (a) tenor/pelibat wacana, (b) bidang/medan wacana, dan (c) mode/sarana wacana pada berita-berita media-media online mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Adapun analisis konteks dilakukan dengan mengkaji situasi sosial dan kultural saat teks diproduksi melalui kajian pustaka dari artikel jurnal, prosiding, dan buku-buku yang relevan.

## **TEMUAN & DISKUSI**

### **Diskursus Media-media Online mengenai Penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU**

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk diskursus media online tentang penerimaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Muhammadiyah dan NU, yaitu diskursus yang menyetujui (pro) dan diskursus yang menolak (kontra) penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU.

Berdasarkan hasil analisis, berkaitan dengan diskursus yang menyetujui penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU menunjukkan bahwa dari elemen pelibat wacana yang dimunculkan oleh media-media online didominasi oleh sumber-sumber dari kalangan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, dan anggota DPR. Pimpinan Muhammadiyah yang terlibat dalam diskursus ini di antaranya adalah Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah), Anwar Abbas (Anggota PP Muhammadiyah), Azrul Tanjung (Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah), dan Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah). Sedangkan dari pimpinan NU terdapat Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU), dan Ulil Abshar Abdalla (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) sebagai pelibat wacana yang ditampilkan oleh media-media online. Adapun pelibat dari anggota DPR adalah Ashabul Kahfi (Ketua Komisi VIII DPR RI), dan Saleh Daulay (Ketua DPP PAN).

Pada elemen bidang wacana, terdapat berbagai wacana yang dimunculkan oleh media-media online berkaitan dengan diskursus yang menyetujui penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Bentuk-bentuk bidang wacana yang dimunculkan pelibat wacana dari kalangan pimpinan Muhammadiyah di media-media online di antaranya: (1) Muhammadiyah menerima IUP dan siap mengelola usaha pertambangan karena niat baik pemerintah dan sudah dipertimbangkan dengan matang; (2) IUP untuk ormas keagamaan adalah untuk memberikan

kebaikan dan merupakan bagian dari tajdid (pembaruan) ekonomi dan bidang sosial; (3) pertambangan bagian dari muamalah yang tidak haram, Muhammadiyah menerima IUP dengan prinsip yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan; dan (4) usaha pertambangan diharapkan menjadi sarana praktik keilmuan dan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa, memberdayakan kader dan masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan.

Bentuk-bentuk bidang wacana yang dimunculkan pelibat wacana dari kalangan pimpinan Muhammadiyah di media-media online di antaranya dapat dilihat pada berita-berita dengan judul berikut: *"PP Muhammadiyah Resmi Umumkan Siap Kelola Tambang"* (detik.com, 28/07/2024), *"Muhammadiyah Terima Izin Usaha Tambang, Haedar Nashir: Kami Tak Kejar Keuntungan"* (Kompas.com, 28/07/2024), *"Terima Izin Tambang, Muhammadiyah Sebut Punya SDM dan Buat Ajang Praktik Mahasiswa"* (Kompas.com, 29/07/2024), *"Haedar Nashir Beberkan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang"*, (tempo.co, 28 Juli 2024), dan *"Delapan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang dari Pemerintah"* (tempo.co, 29 Juli 2024).

Adapun bidang wacana yang diangkat dari kalangan pimpinan NU di media-media online di antaranya adalah: (1) NU menerima IUP karena kebutuhan organisasi; (2) PBNU akan profesional mengelola tambang; (3) tambang adalah anugerah maka harus dikelola dengan baik; dan (4) pertambangan itu halal bukan haram. Bentuk-bentuk bidang wacana yang diangkat dari kalangan pimpinan NU di media-media online di antaranya terdapat pada judul-judul berita berikut: *"PBNU Sudah Ajukan Izin Kelola Tambang, Gus Yahya: Wong Butuh, Gimana Lagi"* (detik.com, 06/07/2024), *"PBNU: Tambang Anugerah Allah untuk Bangsa Ini, Harus Dikelola"* (detik.com, 27/06/2024), *"PBNU: Tambang dari Pemerintah Halal, Tak Haram Sama Sekali"* (Kompas.com, 10/07/2024), *"Alasan PBNU Terima Izin Tambang"* (tempo.co, 06/06/2024), dan *"Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya"* (tempo.co, 15/06/2024).

Sedangkan bidang wacana dari anggota DPR di media-media online adalah (1) Muhammadiyah dan NU mempunyai banyak pengalaman dalam melayani umat sehingga tidak perlu diragukan lagi; (2) Ormas Islam Itu mempunyai kemampuan mengelola pertambangan; dan (3) Ormas keagamaan dalam mengelola pertambangan akan lebih ramah lingkungan. Berita-berita media-media online yang menampilkan bidang wacana dari anggota DPR misalnya pada judul *"Ketua Komisi VIII DPR Yakin NU-Muhammadiyah Tak Serampangan*

*Kelola Tambang*" (detik.com, 11/06/2024), dan *"PKS Terkejut Muhammadiyah Kelola Tambang, PAN: Agak Aneh Orang Ragu"* (detik.com, 30/07/2024).

Pada elemen sarana wacana, bahasa yang banyak digunakan oleh pelibat wacana dalam bidang wacana yang ditampilkan oleh media-media online berkaitan dengan diskursus menyetujui penerimaan IUPK adalah gaya bahasa deskriptif, argumentatif, dan persuasif. Gaya bahasa deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu masalah secara jelas dan terperinci, sedangkan gaya argumentatif dipakai untuk menyampaikan pendapat disertai alasan yang kuat, Adapun gaya bahasa persuasif digunakan untuk membujuk atau memengaruhi orang lain.

Dalam wacana media-media online mengenai diskursus yang menyetujui penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU, bahasa deskriptif digunakan media-media online untuk menjelaskan mengenai latar belakang penerimaan IUP, seperti pada berita *"PBNU Sudah Ajukan Izin Kelola Tambang, Gus Yahya: Wong Butuh, Gimana Lagi"* (detik.com, 06/07/2024), *"Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan, PP Muhammadiyah Sebut Pertimbangkan 4 Aspek Ini"* (Kompas.com, 26/07/2024), dan *"Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas"* (tempo.co, 25/07/2024).

Sedangkan bahasa argumentatif dipakai media-media online untuk memperkuat alasan penerimaan IUPK, sebagaimana dapat dilihat pada isi berita yang berjudul *"PBNU: Tambang Anugerah Allah untuk Bangsa Ini, Harus Dikelola"* (detik.com, 27/06/2024), *"Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan"* (Kompas.com, 25/07/2024), *"Alasan PBNU Terima Izin Tambang"* (tempo.co, 06/06/ 2024), dan *"Delapan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang dari Pemerintah"* (tempo.co, 29/07/2024)

Adapun bahasa persuasif digunakan media-media online untuk menyakinkan bahwa penerimaan IUPK adalah sudah sesuai dan tepat seperti yang terlihat pada berita yang berjudul *"Gus Yahya Jamin PBNU Profesional Kelola Tambang"* (detik.com, 11/06/2024), *"Ketua Komisi VIII DPR Yakin NU-Muhammadiyah Tak Serampangan Kelola Tambang"* (detik.com, 11/06/2024), *"Terima Izin Tambang, Muhammadiyah Sebut Punya SDM dan Buat Ajang Praktik Mahasiswa"* (Kompas.com, 29/07/2024), dan *"Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya"* (tempo.co, 15/06/2024).

Tabel 1. Diskursus yang Menyetujui Penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU.

Elemen Wacana	Analisis Wacana
Pelibat Wacana	Didominasi oleh sumber-sumber dari kalangan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, dan anggota DPR.
Bidang Wacana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammadiyah menerima IUP dan siap mengelola usaha pertambangan karena niat baik pemerintah dan sudah dipertimbangkan dengan matang.</li> <li>- Izin pertambangan untuk ormas keagamaan adalah untuk memberikan kebaikan, merupakan bagian dari tajdid (pembaruan) ekonomi dan bidang sosial.</li> <li>- Pertambangan bagian dari muamalah yang tidak haram, Muhammadiyah menerima IUPK dengan prinsip yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan.</li> <li>- IUPK menjadi sarana praktik keilmuan dan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa, memberdayakan kader dan masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan.</li> <li>- NU menerima IUPK karena kebutuhan organisasi, dan PBNU akan profesional dalam mengelola tambang.</li> <li>- Pertambangan itu anugerah maka harus dikelola, dan pertambangan itu halal bukan haram.</li> <li>- Muhammadiyah dan NU mempunyai banyak pengalaman dalam melayani umat sehingga tidak perlu diragukan.</li> <li>- Ormas Islam mempunyai kemampuan mengelola pertambangan.</li> <li>- Ormas keagamaan dalam mengelola pertambangan akan lebih ramah lingkungan.</li> </ul>
Sarana Wacana	Deskriptif, argumentatif, dan persuasif.

*Sumber: diolah dari hasil penelitian*

Selanjutnya, berkaitan dengan diskursus yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU dianalisis dari elemen pelibat wacana didominasi oleh pelibat-pelibat dari tokoh internal Muhammadiyah, kalangan aktivis LSM, akademisi/pakar, dan anggota DPR. Pelibat dari tokoh internal Muhammadiyah yang ditampilkan media-media online dalam diskursus menolak penerimaan IUPK di antaranya adalah Hening Parlan (Ketua Divisi

Lingkungan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana) PP Aisyiyah, Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Amien Rais (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Akhid Widi Rahmanto (Wakil Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Jogjakarta), Trisno Raharjo (Ketua MHH PP Muhammadiyah), Maneger Nasution (Wakil Ketua MHH Muhammadiyah), dan Usman Hamid (Ketua Bidang Studi dan Advokasi Kebijakan Publik Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah).

Dari kalangan internal NU tidak ada pelibat wacana yang ditampilkan media-media online berkaitan dengan diskursus menolak penerimaan IUPK. Adapun pelibat dari kalangan aktivis LSM yang dimunculkan media-media online di antaranya adalah Masduki (aktivis sosial Forum Cik Di Tiro), Siti Mauliani (Aliansi Muda Peduli Muhammadiyah), Fanny Tri Jambore Christanto (Manajer Kampanye Tambang dan Energi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Melky Nahar (Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang/JATAM), dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam.

Sedangkan pelibat wacana dari kalangan akademisi/pakar yang ditampilkan dalam diskursus media-media online menolak penerimaan IUPK di antaranya Fahmy Radhi (Ahli ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada), Ginting Jalu Kusuma (Dosen Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung), Heru Prasetya (Akademisi UGM), dan Lya Esty Pratiwi (Akademisi UM Surabaya). Adapun pelibat wacana dari anggota DPR yang menolak penerimaan IUPK oleh Ormas yang ditampilkan media-media online adalah Mulyanto (Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI).

Pada elemen bidang wacana terdapat berbagai bentuk wacana yang dimunculkan media-media online melalui pelibat-pelibat wacana. Bentuk-bentuk bidang wacana dari pelibat wacana kalangan internal Muhammadiyah yang ditampilkan media-media online di antaranya adalah (1) menolak Muhammadiyah menerima IUPK karena dampaknya pada kerusakan lingkungan, Muhammadiyah sebaiknya fokus pada transisi energi daripada mengurus pertambangan, dan (2) banyak kader Muhammadiyah keberatan Muhammadiyah menerima IUPK karena banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

Bidang-bidang wacana dari diskursus yang menolak penerimaan IUPK dari kalangan internal Muhammadiyah di media-media online dapat dilihat pada berita-berita berikut: "*Aisyiyah Tolak Izin Tambang: Tanpa Menambang, Muhammadiyah Mampu*" (detik.com, 26/07/2024), "*Blak-blakan Wakil Ketua PDM Jogja Tak Setuju Muhammadiyah Kelola Tambang*" (detik.com, 29/07/2024), "*Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan*"

(Kompas.com, 06/06/2024), *"PP Muhammadiyah Diharapkan Tolak Izin Tambang Ormas Keagamaan"* (Kompas.com, 04/07/2024), dan *"Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Amien Rais: Pertambangan Pasti Merusak Lingkungan"* (tempo.co, 28/07/2024).

Sedangkan medan wacana dari kalangan aktivis LSM yang ditampilkan media-media online berkaitan dengan diskursus menolak penerimaan IUPK adalah (1) mendesak Muhammadiyah menolak IUP karena banyak mudharatnya daripada maslahatnya, merusak ekologi dan lingkungan, (2) penerimaan IUP akan membuat Ormas kehilangan legitimasi melakukan kritik terhadap dunia pertambangan, (3) pertambangan merupakan bisnis yang kotor dan banyak Nahdliyin yang menjadi korban.

Bidang wacana yang menolak penerimaan IUPK oleh Ormas dari pelibat wacana kalangan aktivis LSM dapat ditemukan pada media-media online dengan judul berita-berita berikut: *"Rapat Muhammadiyah Bahas soal Tambang Diwarnai Aksi Demo-Bakar KTA"* (detik.com, 27/07/2024), *"Lagi, Demo Tolak Izin Tambang Goyang Rapat Konsolidasi Muhammadiyah di Jogja"* (detik.com, 27/07/2024), *"Muhammadiyah Janji Bikin Tambang Pro-Lingkungan, Ini Kata Pengamat dan Walhi"* (Kompas.com, 29/07/2024), *"NU dan Muhammadiyah Sulit Advokasi Korban Tambang karena Akan Dicap Persaingan Bisnis"* (Kompas.com, 30/07/2024), dan *"Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang"* (tempo.co, 10/06/2024).

Dari kalangan akademisi/pakar bidang wacana yang dimunculkan media-media online berkaitan dengan diskursus penolakan penerimaan IUPK adalah (1) Muhammadiyah dan NU tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas di bidang pertambangan, (2) IUPK untuk Ormas Keagamaan melanggar UU Administrasi Pemerintahan, dan (3) IUPK Ormas berpotensi ditunggangi perusahaan dan Ormas akan terkooptasi oleh pemerintah. Judul-judul berita media-media online yang menunjukkan bidang wacana menolak penerimaan IUPK oleh Ormas dari akademis/pakar adalah *"Pakar UGM Kritik Keras Muhammadiyah soal Tambang: Banyak Mudaratnya!"* (detik.com, 29/07/2024), *"Muhammadiyah Janji Bikin Tambang Pro-Lingkungan, Ini Kata Pengamat dan Walhi"* (Kompas.com, 29/07/2024), *"Dosen Muhammadiyah Sebut Izin Tambang Ormas Berpotensi Ditunggangi Perusahaan"* (tempo.co, 10/06/2024), dan *"Alasan Nahdliyin Alumni UGM Tolak PBNU Ikut Kelola Tambang"* (tempo.co, 10/06/2024).

Adapun bidang wacana dari anggota DPR yang ditampilkan media-media online berkaitan dengan diskursus penolakan penerimaan IUPK adalah Muhammadiyah membuat keputusan

di luar harapan masyarakat, dan low politics. Bidang wacana dari anggota DPR yang menolak penerimaan IUPK oleh Ormas tersebut dapat diamati pada berita-berita media-media online berjudul *"Anggota Komisi VII Kaget Muhammadiyah Siap Kelola Tambang: Biasanya Kritis"* (detik.com, 29/07/2024), *"Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang Dianggap Membingungkan"* (Kompas.com, 29/07/2024), *"Terima Izin Tambang, Muhammadiyah Dianggap Turun ke 'Low Politics'"* (Kompas.com, 29/07/2024), dan *"Ragam Reaksi atas Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang dari Pemerintah"* (29/07/2024).

Pada elemen sarana wacana, bahasa yang digunakan oleh pelibat wacana dalam bidang wacana yang ditampilkan oleh media-media online berkaitan dengan diskursus menolak penerimaan IUPK adalah sama dengan diskursus menyetujui yakni gaya bahasa deskriptif, argumentatif, dan persuasif. Dalam wacana media-media online mengenai diskursus yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU, bahasa deskriptif digunakan media-media online untuk mendeskripsikan mengenai latar belakang penolakan IUPK.

Bahasa deskriptif mengenai penolakan IUPK dapat dilihat pada judul-judul berita *"Rapat Muhammadiyah Bahas soal Tambang Diwarnai Aksi Demo-Bakar KTA"* (detik.com, 27/07/2024), *"Lagi, Demo Tolak Izin Tambang Goyang Rapat Konsolidasi Muhammadiyah di Jogja"* (detik.com, 27/07/2024), *"PP Muhammadiyah Diharapkan Tolak Izin Tambang Ormas Keagamaan"* (Kompas.com, 04/07/2024), *"Usman Hamid: Kalau Dilihat Dari Hasil Mukhtamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak"* (Kompas.com, 04/07/2024), *"Muhammadiyah Sebut Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Administrasi Pemerintahan"* (tempo.co, 09/06/2024), dan *"Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang"* (tempo.co, 10/06/2024).

Sedangkan bahasa argumentatif dipakai media-media online untuk memperkuat alasan penolakan IUPK, sebagaimana dapat dilihat pada isi berita yang berjudul *"Aisyiyah Tolak Izin Tambang: Tanpa Menambang, Muhammadiyah Mampu"* (detik.com, 26/07/2024), *"Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan"* (Kompas.com, 06/06/2024), *"Ketimbang Urus Tambang, PP Muhammadiyah Harusnya Fokus Pada Isu Transisi Energi"* (Kompas.com, 26/07/2024), *"Alasan Nahdliyin Alumni UGM Tolak PBNU Ikut Kelola Tambang"* (tempo.co, 10/06/2024), dan *"Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang"* (tempo.co, 10/06/2024).

Adapun bahasa persuasif digunakan media-media online untuk menyakinkan bahwa penolakan IUPK adalah sudah sesuai dan tepat seperti yang terlihat pada berita yang berjudul

"Pakar UGM Kritik Keras Muhammadiyah soal Tambang: Banyak Mudaratnya!" (detik.com, 29/07/2024), "Terima Izin Tambang, Muhammadiyah Dianggap Turun ke "Low Politics" (Kompas.com, 29/07/2024), "NU dan Muhammadiyah Sulit Advokasi Korban Tambang karena Akan Dicap Persaingan Bisnis" (Kompas.com, 30/07/2024), "Dosen Muhammadiyah Sebut Izin Tambang Ormas Berpotensi Ditunggangi Perusahaan" (tempo.co, 10/06/2024), dan "Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Amien Rais: Pertambangan Pasti Merusak Lingkungan" (tempo.co, 28/07/2024).

Tabel 2. Diskursus yang Menolak Penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU.

Elemen Wacana	Analisis Wacana
Pelibat Wacana	Didominasi oleh sumber-sumber dari tokoh internal Muhammadiyah, kalangan aktivis LSM, dan akademisi/pakar.
Bidang Wacana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak Muhammadiyah menerima IUPK karena dampaknya pada kerusakan lingkungan, Muhammadiyah sebaiknya fokus pada transisi energi daripada mengurus pertambangan.</li> <li>- Banyak kader Muhammadiyah keberatan Muhammadiyah menerima IUPK karena banyak mudharat daripada maslahatnya.</li> <li>- Mendesak Muhammadiyah menolak IUPK karena merusak ekologi dan lingkungan.</li> <li>- Penerimaan IUPK akan membuat Ormas kehilangan legitimasi melakukan kritik terhadap dunia pertambangan.</li> <li>- Pertambangan merupakan bisnis yang kotor dan banyak Nahdliyin yang menjadi korban.</li> <li>- Muhammadiyah dan NU tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas di bidang pertambangan.</li> <li>- IUPK untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Administrasi Pemerintahan</li> <li>- IUPK Ormas Berpotensi ditunggangi Perusahaan dan Ormas akan terkooptasi oleh pemerintah.</li> <li>- Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat, dan <i>low politics</i>.</li> </ul>
Sarana Wacana	Deskriptif, argumentatif, dan persuasif.

Sumber: diolah dari hasil penelitian

### **Media Routines pada Diskursus Media Online mengenai Penerimaan IUPK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus media-media online mengenai penerimaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Muhammadiyah dan NU terdapat dua bidang diskursus yaitu diskursus menyetujui dan diskursus yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Pada bidang diskursus yang menyetujui, pelibat wacana yang ditampilkan oleh media-media online didominasi sumber-sumber dari kalangan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, dan anggota DPR. Sedangkan pada bidang diskursus yang menolak, pelibat wacana yang dimunculkan oleh media-media online lebih dominan dari tokoh internal Muhammadiyah, aktivis LSM, dan akademisi/pakar. Untuk sarana wacana baik pada bidang diskursus menyetujui dan menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU sama-sama menggunakan bahasa deskriptif, argumentatif, dan persuasif.

Dikaitkan dengan konsep diskursus yang digunakan dalam penelitian ini, maka di sini menunjukkan adanya semacam pertarungan diskursus antara pihak yang menyetujui dengan pihak yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Dalam diskursus ini posisi media massa (online) adalah medium atau sarana pertarungan kedua bentuk diskursus tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Norman Fairclough bahwa dalam konteks komunikasi, diskursus merupakan relasi antara orang-orang yang berbicara, menulis, dan cara-cara berkomunikasi seseorang dengan orang lainnya, termasuk menggambarkan peristiwa-peristiwa komunikatif yang menggunakan media massa seperti pemberitaan, dan penulisan artikel (Fairclough, 2010).

Tujuan diskursus adalah untuk penciptaan makna tertentu dengan menggunakan bahasa tertentu pada praktik sosial tertentu juga, dan untuk mengonstruksi aspek-aspek dunia tertentu yang dikaitkan dengan sudut pandang atau perspektif tertentu (Fairclough, 2013). Di sini, pelibat wacana baik dari pihak yang menyetujui ataupun menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU berupaya menciptakan makna tertentu dengan memakai bahasa tertentu dan dari perspektif tertentu. Pada bidang diskursus yang menyetujui penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU pelibat wacana menciptakan makna dan mengonstruksi realitas bahwa penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU adalah harus disetujui dan didukung karena Muhammadiyah dan NU memunyai banyak pengalaman dalam melayani umat sehingga tidak perlu diragukan dalam mengelola pertambangan. Selain itu, Muhammadiyah dan NU memunyai kemampuan mengelola pertambangan, kedua Ormas ini dalam mengelola pertambangan akan lebih ramah lingkungan.

Sebaliknya, pada bidang diskursus yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU, para pelibat wacana di sini juga menciptakan makna dan mengonstruksi realitas sosial bahwa penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU merupakan Keputusan yang harus ditolak karena Muhammadiyah dan NU tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas di bidang pertambangan. Di samping itu, penerimaan IUPK dipandang lebih banyak mendatangkan madharat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), termasuk kerusakan lingkungan dan ekologi. Penerimaan IUPK juga akan mendeligitimasi posisi Muhammadiyah dan NU selama ini sebagai Ormas yang kritis terhadap masalah pertambangan karena terlibat di dalamnya.

Lantas, apa faktor yang memengaruhi diskursus media-media online mengenai penerimaan IUPK Muhammadiyah dan NU? Bila merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi pola-pola isi media, dimana diskursus media dipandang sebagai salah satu bentuk pola-pola isi media, maka faktor yang memengaruhi diskursus pemberitaan media-media online mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU adalah faktor rutinitas media (*media routines*). Menurut Shoemaker dan Reese, terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi pola-pola isi media, termasuk wacana media yaitu (a) individu pekerja media, (b) praktik/rutinitas media, (c) organisasi media, (d) ekstramedia, dan (e) ideologi media (Shoemaker & Reese, 1996).

Rutinitas-rutinitas media sebagai faktor yang menentukan diskursus merupakan pola-pola (*patterns*), rutinitas (*routinizes*), praktik atau kegiatan yang diulang-ulang yang mana pekerja media menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Dalam rutinitas media terdapat tiga elemen sumber yang saling berhubungan, yaitu (a) organisasi media (*processor*), (b) khalayak (*consumers*), dan (c) sumber-sumber (*suppliers*) (Shoemaker & Reese, 1996).

Organisasi media (*processor*) dalam rutinitas media berfungsi sebagai pemeroses informasi dari mengumpulkan bahan mentah sampai mengevaluasi hasil. Salah satu posisi penting dalam organisasi media berkaitan dengan pemerosesan informasi adalah *gatekeeper*, yang berperan memilih, menentukan, dan mengambil keputusan mengenai informasi apa yang mesti ditampilkan (Shoemaker et al., 2001). Peran-peran *gatekeeper* tersebut dalam rutinitas organisasi media dilakukan oleh editor. Dalam diskursus media-media online mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU, *gatekeeper* (editor) berperan menentukan perspektif pemberitaan (*news perspective*) atau *angle* pemberitaan apakah menyetujui atau menolak penerimaan IUPK, memilih sumber berita yang sesuai, dan menentukan bahasa yang digunakan untuk menampilkan sudut pemberitaan.

Elemen rutinitas media berikutnya adalah khalayak atau audien sebagai konsumen (*consumers*). Dalam konteks komunikasi massa khalayak adalah penerima (*receiver*) pesan media-media massa, atau disebut juga sebagai *media users*. Dalam rutinitas media, khalayak sebagai konsumen ini menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan hidup media. Maka dari itu, untuk menarik perhatian khalayak ini media-media massa melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menampilkan berita-berita yang memiliki nilai berita (*news values*). Nilai-nilai berita secara umum mencakup hal-hal berikut: (a) keutamaan dan kepentingan, (b) *human interest*, (c) konflik/kontroversial, (d) di luar kebiasaan (*unusual*), (e) garis waktu, dan (f) proksimitas atau kedekatan (Shoemaker & Reese, 1996).

Pada diskursus pemberitaan media-media online mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU setidaknya memiliki dua nilai berita yaitu keutamaan/kepentingan, dan konflik/kontroversial. Pertama, dilihat dari nilai keutamaan/kepentingan, isu pemberian IUPK ini memiliki nilai berita yang utama karena selain masalah pertambangan merupakan masalah yang sensitif, juga karena masalah IUPK ini menyangkut kepentingan banyak kalangan yaitu pemerintah sebagai pemberi izin, ormas keagamaan (Muhammadiyah dan NU), dan warga kedua Ormas tersebut. Kedua, isu penerimaan IUPK oleh Ormas Keagamaan ini juga mengandung konflik atau kontroversial, terdapat pihak-pihak yang berbeda pandangan, ada yang menyetujui ada pula yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Salah satu penyebab kontroversi adalah posisi Muhammadiyah dan NU sendiri sebagai Ormas keagamaan yang selama ini kritis terhadap dampak lingkungan pertambangan tetapi ternyata saat ini justru menerima IUPK dari pemerintah.

Berkaitan dengan sumber-sumber eksternal dalam rutinitas media merujuk pada saluran-saluran (*channels*) dan narasumber (*sources*) pemberitaan. Saluran dan narasumber yang digunakan oleh media-media massa akan menentukan kecenderungan isi media akan seperti apa. Pada isu penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU, penentuan saluran dan narasumber akan memengaruhi bentuk bidang diskursus media-media online, apakah akan menyetujui atau menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Dari narasumber yang digunakan oleh media-media online terlihat bahwa narasumber dari kalangan pimpinan Muhammadiyah dan NU lebih cenderung pada diskursus yang menyetujui penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Sedangkan narasumber dari kalangan aktivis LSM dan akademisi atau pengamat lebih pada diskursus yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU.

Selain pengaruh faktor rutinitas media, diskursus media juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain semisal faktor kekuatan dominan seperti negara dan kekuatan lainnya. Kajian mengenai peran Negara pada diskursus LGBT di media daring yang cenderung dipenuhi ujaran kebencian dan memosisikan kelompok LGBT sebagai obyek (Listiorini et al., 2019). Faktor ideologi juga dapat menentukan sebuah diskursus seperti diskursus media mengenai komunisme yang menunjukkan faktor ideologi antikomunisme menentukan pemberitaan media (Kudri & Ciptadi, 2023).

## KESIMPULAN

Terdapat dua bidang diskursus pemberitaan media-media online mengenai penerimaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Muhammadiyah dan NU yaitu diskursus yang menyetujui dan diskursus yang menolak penerimaan IUPK. Pada bidang diskursus yang menyetujui, pelibat wacana yang ditampilkan oleh media-media online didominasi sumber-sumber dari kalangan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, dan anggota DPR. Sedangkan pada bidang diskursus yang menolak, pelibat wacana yang dimunculkan oleh media-media online lebih dominan dari tokoh internal Muhammadiyah, aktivis LSM, dan akademisi/pakar. Untuk sarana wacana baik pada bidang diskursus menyetujui dan diskursus menolak penerimaan IUPK sama-sama menggunakan bahasa deskriptif, argumentatif, dan persuasif.

Faktor yang memengaruhi diskursus pemberitaan media-media online mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU adalah faktor rutinitas media (*media routines*), yang meliputi organisasi media (*processor*), khalayak (*consumers*), dan sumber-sumber (*suppliers*). Dalam organisasi media, melalui *gatekeeper* (editor) ditentukan perspektif atau sudut pemberitaan media-media online apakah menyetujui atau menolak penerimaan IUPK. Termasuk memilih sumber berita yang sesuai, dan menentukan bahasa yang digunakan untuk menampilkan sudut pemberitaan. Sedangkan faktor khalayak memengaruhi diskursus dalam aspek nilai berita, di mana isu penerimaan IUPK memiliki keutamaan dan menyangkut kepentingan orang banyak, serta mengandung konflik atau kontroversi. Adapun faktor sumber-sumber pendukung, berkaitan dengan pemilihan narasumber dan saluran yang digunakan. Sumber-sumber dari kalangan pimpinan Muhammadiyah dan NU lebih menunjukkan diskursus yang menyetujui penerimaan IUPK, sementara sumber-sumber dari kalangan aktivis LSM dan pengamat atau pakar cenderung menampilkan diskursus yang menolak penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU.

## REKOMENDASI

Penelitian ini membatasi analisis diskursusnya pada media online saja, sementara terdapat media-media lain, terutama media sosial dalam berbagai platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok, dan X yang juga menampilkan diskursus mengenai penerimaan IUPK oleh Muhammadiyah dan NU. Maka dari itu, sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya penting untuk menganalisis diskursus suatu isu pada media-media sosial tersebut dengan menggunakan metode analisis wacana model yang lain seperti analisis wacana model Teun van Dijk atau model Norman Fairclough karena elemen analisis wacananya lebih komprehensif. Selain itu, kedua model tersebut lebih memberikan kajian analisis yang mengaitkan diskursus dengan relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan ekonomi-politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amerian, M., & Esmaili, F. (2014). Language and gender: A critical discourse analysis on gender representation in a series of international ELT textbooks. *International Journal of Research Studies in Education*, 4(2), 3–12. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2014.963>
- Apriyanto, D., & Maruf, S. N. A. (2024). Implementasi kesejahteraan masyarakat dalam prioritas WIUPK untuk badan usaha keagamaan berdasarkan PP No. 25 tahun 2024. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 367–380.
- Astinda, A. N. R., Pratama, W. P., & Haidar, M. B. (2024). Konflik regulasi dan masalah kelayakan pada kebijakan izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1851–1864. <https://iprosiding.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10900/4707>
- Azmah, S. F. N., Ansoriyah, S., & Mayumi, I. (2023). Analisis wacana kritis fairclough dalam wacana pilpres 2024 (studi kasus berita di instagram @Pinterpolitik). *J-P3K: Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi, Dan Kesehatan*, 4(2), 45–53. <http://jurnalp3k.com/index.php/J-P3K/article/view/200>
- Barton, G. (2014). The gülen movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive islamic thought, religious philanthropy and civil society in Turkey and Indonesia. *Islam and Christian–Muslim relations*, 25(3), 287–301. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.916124>
- Berger, A. A. (2011). *Media and communication research methods an litroduction to qualitative and quantitative approach* (2nd ed.). Singapore: Sage.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* Bryman. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Eriyanto. (2019). *Metode Penelitian Komunikasi* (3rd ed.). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. New York: St. Martin's Press Inc.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis the critical study of language*. Edinburgh: Logman Applied Linguistics.
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177–197. <https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239>
- Fariduddin, A. M., & Kusuma, O. A. (2024). Menyibak ilusi ideologi dalam pemberian izin pertambangan bagi organisasi masyarakat keagamaan sebagai upaya pembangunan nasional. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS*, 93–106.

- <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4692/4273>
- Halliday, M. A. ., & Hasan, R. (1992). *Bahasa, konteks, dan teks: Aspek-aspek bahasa dalam pandangan semiotika sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hefner, R. W. (2001). *Civil islam: Islam dan demokrasi di Indonesia* (A. Baso, Trans). Institute Studi Arus Informasi & The Asia Foundation.
- Kudri, P., & Ciptadi, S. G. (2023). Analisis diskursus berita komunisme harian Kompas sebelum dan sesudah peristiwa gerakan 30 September 1965. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 96–113. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i1.5>
- Listiorini, D., Asteria, D., & Hidayana, I. (2019). Diskursus ujaran kebencian pemerintah pada kasus LGBT di media daring. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(2), 243–258. <https://doi.org/10.24002/jik.v16i2.2430>
- Lubis, A. A. (2014). *Teori dan metodologi ilmu pengetahuan sosial budaya kontemporer* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Nashir, H. (2010). Memahami manhaj gerakan Muhammadiyah. In *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*. Suara Muhammadiyah & Majelis Kader PP Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2014). *Memahami ideologi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah dan Majelis Kader PP Muhammadiyah.
- Prastika, A., Putri, M.F.I., & Tasya, V.N. (2024). Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan “keagamaan” di Indonesia: Analisis regulasi dalam PP nomor 25 tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 214–224. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>
- Putera, I. R. (2024). Dinamika pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan “Keagamaan” dalam sudut pandang potensi pelanggaran HAM. *KULTURA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(8), 239–247.
- Ricoeur, P. (2006). *Hermeneutika ilmu sosial* (M. Syukri, Trans). Kreasi Wacana.
- Ricoeur, P., & Thompson, J. B. (2016). Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and interpretation. In *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316534984>
- Rohma, M. N. (2024). Navigating digital activism on environmental movement: Mining license grants to religious organizations in Indonesia. *Insignia Journal of International Relations*, 11(2), 184–205. <https://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/13533/6180>
- Romadlan, S. (2019). Diskursus makna toleransi terhadap non-muslim dalam Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan (analisis hermeneutika Paul Ricoeur). *Komuniti*, 11(2), 101–118. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i2.9633>
- Romadlan, S. (2020). Diskursus negara Pancasila di kalangan Muhammadiyah. *Jurnall Sosial Politik*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.10041>
- Romadlan, S. (2022). Nahdlatul Ulama dan praktik deradikalisasi di media online. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 220–244. <https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.2.220-244>
- Romadlan, S., Wibisono, D. P., & Triwahyuningsih, Z. (2021). Kontradiskursus makna jihad sebagai teror di media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(2), 151. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.4355>
- Rumadi, Fuaidi, H. A. N., & Ma’afi, H. M. (2016). *Hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama* (Rumadi, H. A. N. Fuaidi, & H. M. Ma’afi (eds.); II). Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU.
- Shoemaker, P. J., Eichholz, M., Kim, E., & Wrigley, B. (2001). Individual and routine forces in gatekeeping. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 78(2), 233–246. <https://doi.org/10.1177/107769900107800202>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the message theories of influences on*

*mass media content* (2nd ed.). New York, Longman Publisher.

Sholahudin, T., & Maksum, M. N. R. (2024). Analisis dampak sosial dan ekonomi dari pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2), 672–682.

<https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>

Sutley, S., & Hefner, R. W. (2001). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. *Pacific Affairs*, 74(3), 459. <https://doi.org/10.2307/3557788>

van Bruinessen, M. (2003). Post-Soeharto Muslim engagements with civil society and democratization. in H. Samuel & H. Schulte Nordholt (Eds.), *Indonesia in transition: Rethinking 'civil society', 'region' and 'crisis'*, (pp. 37-66). Pustaka Pelajar.

[https://www.academia.edu/2636143/Post Suharto Muslim engagements with civil society and democratization](https://www.academia.edu/2636143/Post_Suharto_Muslim_engagements_with_civil_society_and_democratization)

Wafi, M. H., Ikhwan, S., & Handoko, T. (2022). Islam Nusantara dan diskursus politik: Analisis wacana kritis berita di CNN Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 83–105. <https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.1.83-105>